

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAERAH SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

Devy Octaviana S
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Abstract: *This research is aimed to know the efficiency and effectiveness of local tax revenue and also the contribution to local revenue of Central Java province. Local tax as one component of local revenue is administrated by local governments at both provincial and district/city that is useful for supporting local revenue receipts and the proceeds are included in the local revenue. This research is using descriptive analysis with CCER and CPI method. The results are: local tax revenue growth of Central Java province during the period of 2008-2012 has increased to an average of 13,09% per year and is generally considered to be very effective with BBN-KB as the most effective sector with an average effectiveness level of 117,51% per year, local tax revenue is considered to be very efficient with an average efficiency level of 0,076% per year, local tax revenue dominates the local revenue with an average contribution of 86,74% per year.*

Keywords: *local tax, efficiency, effectiveness, contribution*

PENDAHULUAN

Reformasi yang dimulai beberapa tahun yang lalu di Indonesia telah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek pemerintahan, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan pada aspek pemerintahan didorong oleh berbagai tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang lebih demokratis, sehingga menuntut suatu perubahan pemerintah pusat agar memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Kurniawan (2006), disahkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan langkah besar yang ditunggu-tunggu oleh daerah. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, yang selama ini dirasakan adanya ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan antara pusat dan daerah. Undang-undang tersebut selanjutnya disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Khusaini (2006), sesuai dengan UU No. 32 dan 33 tahun 2004, perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Penyerahan berbagai kewenangan ini harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana salah satu komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah.

Menurut Waluyo (2005), pajak pada dasarnya adalah pemberian harta kekayaan rakyat, dan atau badan usaha untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Oleh sebab itu pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipungut berdasarkan undang-undang.

Kurniawan (2006) menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Pemerintah pusat telah menunjang penerimaan bagi pemerintah daerah melalui pembagian pajak pusat untuk menunjang pembangunan di daerah, di antaranya, melalui Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Mahmudi (2010) menyebutkan bahwa peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No.11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi penerimaan daerah yang beragam, sudah seharusnya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD). Kemampuan menggali potensi sumber penerimaan daerah tersebut harus diikuti kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya serta kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan tersebut akan memperbesar penerimaan dan menciptakan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dan pelengkap dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam rerangka otonomi daerah. DPPAD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pemungutan, penghimpunan serta pengelolaan penerimaan pajak daerah.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak rokok sendiri baru mulai dikenakan mulai tanggal 1 Januari 2014, seperti dilansir oleh website DPPAD Provinsi Jawa Tengah.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang potensial di Provinsi Jawa Tengah. Pada data Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didapatkan dari DPPAD Provinsi Jawa Tengah, terlihat besarnya total pajak daerah pada akhir tahun 2007 yaitu target sebesar Rp 2.541.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 2.426.080.092.190,- dengan persentase sebesar 81,69% dari total Pendapatan Asli Daerah menunjukkan pajak daerah sangat potensial memberi sumbangan dana bagi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemungutan pajak daerah sudah efektif dan efisien.

Menurut Mardiasmo (2005), efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana merupakan perbandingan *outcome* dengan *input*. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif. Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu, merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi (2011) mengambil judul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi, bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah

Provinsi Jambi dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode CCER dan CPL. Hasil yang diperoleh adalah penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 2002-2009 mengalami peningkatan yang baik dan secara umum berada pada kategori sangat efektif dan sangat efisien dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai sektor yang sangat efektif dan efisien.

Mustafa dan Abdul Halim (2008) melakukan penelitian dengan judul Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, bertujuan untuk mengukur kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah Dispenda Provinsi Kalimantan Barat telah menghasilkan kinerja yang baik dalam mengelola sumber-sumber PAD. Melihat kontribusi dan potensi dari pajak daerah sebagai salah satu komponen PAD, perlu dikiranya dilakukan kajian tentang efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dokumenter dengan menggunakan sumber data sekunder berupa Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2012 yang diperoleh dari bagian Lahan dan Bangunan DPPAD Provinsi Jawa Tengah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Pengendalian Pajak Daerah/Intensifikasi, Ekstensifikasi, Sertifikasi Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2012 yang diperoleh dari bagian Pemrograman DPPAD Provinsi Jawa Tengah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dokumenter dari perangkat kerja DPPAD Provinsi Jawa Tengah, yaitu bagian Lahan dan Bangunan DPPAD Provinsi Jawa Tengah dan bagian Pemrograman DPPAD Provinsi Jawa Tengah.

Definisi Operasional

Definisi operasional variabel penelitian ini sebagai berikut :

- (1) Target pajak daerah
Target pajak daerah merupakan rencana anggaran yang ditetapkan dengan melihat data tahun sebelumnya. Target pajak daerah diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2012.
- (2) Realisasi pajak daerah
Realisasi pajak daerah merupakan hasil akhir pencapaian dari target pajak daerah yang telah ditentukan pada tahun bersangkutan. Realisasi pajak daerah diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2012.
- (3) Biaya pemungutan pajak daerah
Biaya pemungutan penerimaan pajak daerah merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD, termasuk biaya langsung maupun tidak langsung dalam satuan rupiah pertahun. Biaya pemungutan pajak daerah diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Pengendalian Pajak Daerah/Intensifikasi, Ekstensifikasi, Sertifikasi Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2012.
- (4) Efisiensi pajak daerah
Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}$$

Sumber : Data sekunder, DPPAD Provinsi Jawa Tengah.

(5) Efektivitas pajak daerah

Untuk mengetahui tentang tingkat efektifitas pajak daerah, maka perlu mengetahui perkembangan pajak daerah pada masing-masing sektor setiap tahunnya. Pendekatan yang digunakan oleh Dajan (dikutip oleh Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi, 2011) sebagai berikut : PD_{it}

$$\text{Perkembangan } PD_{it} = \frac{PD_{it} - PD_{it-1}}{PD_{it-1}} \times 100$$

Dimana:

PD_{it} = Realisasi pajak daerah jenis i pada tahun tertentu

PD_{it-1} = Realisasi pajak daerah jenis i pada tahun sebelumnya

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}}$$

Sumber : Data sekunder, DPPAD Provinsi Jawa Tengah.

(6) Kontribusi pajak daerah

Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Sumber : Data sekunder, DPPAD Provinsi Jawa Tengah.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang ada.

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

- 1) Mengidentifikasi target pajak daerah pada periode tahun 2008-2012.
- 2) Mengidentifikasi realisasi penerimaan pajak daerah pada periode tahun 2008-2012.
- 3) Menghitung perkembangan dan tingkat efektivitas pajak daerah pada periode tahun 2008-2012.

Hasil pengukuran menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| (1) Sangat tidak efektif | (0 – 40%) |
| (2) Tidak efektif | (40% - 60%) |
| (3) Cukup efektif | (60% - 80%) |
| (4) Efektif | (80% - 100%) |
| (5) Sangat efektif | (> 100%) |

Sumber : Sidik (dikutip oleh Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi, 2011)

- 4) Mengidentifikasi biaya pemungutan pajak daerah pada periode tahun 2008-2012.
- 5) Menghitung tingkat efisiensi pajak daerah pada periode tahun 2008-2012.

Hasil pengukuran menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|-------------|
| (1) Sangat efisien | (0 – 20%) |
| (2) Efisien | (21% - 40%) |
| (3) Cukup efisien | (41% - 60%) |
| (4) Tidak efisien | (61% - 80%) |
| (5) Sangat tidak efisien | (> 80%) |

Sumber : Sidik (dikutip oleh Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi, 2011)

- 6) Menghitung besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada periode tahun 2008-2012.
- 7) Membuat kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

DPPAD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas untuk mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada peningkatan PAD dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan. Penerimaan PAD provinsi Jawa Tengah tidak selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Data realisasi penerimaan PAD provinsi Jawa Tengah selama tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Penerimaan PAD Provinsi Jawa Tengah (dalam rupiah)

Tahun	Jumlah
2008	2.970.030.968.739
2009	4.057.776.195.979
2010	3.716.052.663.294
2011	4.417.869.229.526
2012	5.088.713.212.530

Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa pada setiap tahunnya PAD mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan pada era desentralisasi fiskal pemerintah daerah mampu mengelola sumber-sumber PAD sehingga memberikan penerimaan yang optimal.

Melalui PAD, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan guna memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Komponen utama penerimaan PAD adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah.

Efektivitas Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan PAD yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Besar kecilnya pajak daerah mempengaruhi kapasitas anggaran dalam membiayai pengeluaran, baik untuk pembangunan maupun anggaran rutin.

Tabel 2
Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi
2008	2,952,500,000,000	3,068,130,112,015	-
2009	2,939,766,264,000	3,236,779,048,381	5.50
2010	3,076,000,000,000	3,893,699,996,503	20.30
2011	4,263,000,000,000	4,599,046,986,897	18.12
2012	5,273,190,000,000	5,590,597,156,499	21.56
Rata-rata			13.09

Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah diolah

Berdasarkan Tabel 2, perkembangan penerimaan pajak daerah selama periode tahun 2008-2012 sebesar 82,22% yaitu dari Rp3.058.094.774.264,- pada tahun 2008 menjadi Rp5.590.597.156.499,- pada tahun 2012. Perkembangan terbesar dari total penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2008-2012 terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 21,56% dan terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,50%. Rata-rata perkembangan penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 13,09%.

Penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2012 terus meningkat namun dalam prosentase yang rendah. Hal ini disebabkan karena jenis pajak daerah tidak dapat dikembangkan dengan mudah dan belum banyaknya wajib pajak.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *ouput* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah untuk masing-masing sektor dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan sasaran atau target penerimaan pajak daerah yang direncanakan. Semakin tinggi tingkat efektivitas berarti semakin efektif kinerjanya.

Penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak yang dipungut pemerintah provinsi Jawa Tengah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.

Tabel 3
Penerimaan PKB Provinsi Jawa Tengah (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2008	1,250,000,000,000	1,194,793,800,921	-	95.58	Efektif
2009	1,250,000,000,000	1,333,386,394,490	11.60	106.67	Sangat Efektif
2010	1,305,000,000,000	1,544,313,644,030	15.82	118.34	Sangat Efektif
2011	1,650,000,000,000	1,755,017,905,667	13.64	106.36	Sangat Efektif
2012	1,915,000,000,000	2,024,106,323,231	15.33	105.70	Sangat Efektif
Rata-rata			11.28	106.53	

Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah diolah

Berdasarkan Tabel 3, penerimaan pajak daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama periode 2008-2012 mengalami peningkatan sebesar 69,41% yaitu dari Rp1.194.793.800.921,- pada tahun 2008 menjadi Rp2.024.106.323.231,- pada tahun 2012. Perkembangan terbesar dari total penerimaan PKB provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2008-2012 terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 15,82% dan terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 11,60%. Rata-rata perkembangan penerimaan PKB dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 11,28%. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan PKB sebesar 106,53%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan PKB provinsi Jawa Tengah tergolong sangat efektif.

Penerimaan PKB selama tahun 2008-2012 tergolong sangat efektif dan selalu mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat dimana kendaraan bermotor merupakan kebutuhan primer yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah tercatat mengalami kenaikan tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2008 sejumlah 7.399.020, tahun 2009

sejumlah 8.593.911, tahun 2010 sejumlah 9.318.749, tahun 2011 sejumlah 10.481.143, dan tahun 2012 sejumlah 11.521.288.

Berdasarkan Tabel 4, penerimaan pajak daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama periode 2008-2012 mengalami peningkatan sebesar 134,69% yaitu dari Rp1.100.697.149.794,- pada tahun 2008 menjadi Rp2.583.208.159.855,- pada tahun 2012. Perkembangan terbesar dari total penerimaan BBNKB provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2008-2012 terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 34,25% dan terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 3,21%. Rata-rata perkembangan penerimaan BBNKB dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 19,56%. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan BBNKB sebesar 117,51%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan BBNKB provinsi Jawa Tengah tergolong sangat efektif.

Tabel 4
Penerimaan BBNKB Provinsi Jawa Tengah (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2008	1,010,000,000,000	1,100,697,149,794	-	108.98	Sangat Efektif
2009	997,266,264,000	1,136,036,735,721	3.21	113.92	Sangat Efektif
2010	1,050,000,000,000	1,525,124,469,221	34.25	145.25	Sangat Efektif
2011	1,787,000,000,000	1,957,340,064,573	28.34	109.53	Sangat Efektif
2012	2,351,190,000,000	2,583,208,159,855	31.98	109.87	Sangat Efektif
Rata-rata			19.56	117.51	

Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah diolah

Penerimaan BBNKB selama tahun 2008-2012 tergolong sangat efektif dan selalu mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan makin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5
Penerimaan PBBKB Provinsi Jawa Tengah (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2008	675,000,000,000	756,889,740,739	-	112.13	Sangat Efektif
2009	675,000,000,000	750,478,468,443	(0.85)	111.18	Sangat Efektif
2010	705,000,000,000	806,492,336,428	7.46	114.40	Sangat Efektif
2011	820,000,000,000	878,834,711,005	8.97	107.17	Sangat Efektif
2012	1,001,000,000,000	975,856,575,713	11.04	97.49	Efektif
Rata-rata			5.33	108.47	

Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah diolah

Berdasarkan Tabel 5, penerimaan pajak daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) selama periode 2008-2012 mengalami peningkatan sebesar 28,93% yaitu dari Rp756.889.740.739,- pada tahun 2008 menjadi Rp975.856.575.713,- pada tahun 2012. Perkembangan terbesar dari total penerimaan BBNKB provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2008-2012 terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 11,04% dan terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar -0,85%. Rata-rata perkembangan penerimaan PBBKB dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 5,33%. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan PBBKB sebesar 108,47%.

Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan PBBKB provinsi Jawa Tengah tergolong sangat efektif.

Penerimaan PBBKB selama tahun 2008-2012 tergolong sangat efektif dan selalu mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan makin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di provinsi Jawa Tengah, sehingga makin meningkat juga konsumsi masyarakat terhadap bahan bakar kendaraan bermotor.

Tabel 6
Penerimaan PAP Provinsi Jawa Tengah (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2008	17,500,000,000	15,749,420,561	-	90.00	Efektif
2009	17,500,000,000	16,877,449,727	7.16	96.44	Efektif
2010	16,000,000,000	17,769,546,824	5.29	111.06	Sangat Efektif
2011	6,000,000,000	7,854,305,652	(55.80)	130.91	Sangat Efektif
2012	6,000,000,000	7,426,097,700	(5.45)	123.77	Sangat Efektif
Rata-rata			(9.76)	110.43	

Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah diolah

Berdasarkan Tabel 6, penerimaan pajak daerah dari Pajak Air Permukaan (PAP) selama periode 2008-2012 mengalami penurunan sebesar -52,85% yaitu dari Rp15,749,420,561,- pada tahun 2008 menjadi Rp7.426.097.700,- pada tahun 2012. Perkembangan terbesar dari total penerimaan PAP provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2008-2012 terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 7,16% dan terendah pada tahun 2011 yaitu sebesar -55,80%. Rata-rata perkembangan penerimaan PAP dalam kurun waktu 5 tahun sebesar -9,76%. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan PAP sebesar 110,43%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan PAP provinsi Jawa Tengah tergolong sangat efektif.

Penerimaan PAP selama tahun 2008-2012 tergolong sangat efektif, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2011. Hal ini dikarenakan adanya penghapusan Pajak Air Bawah Tanah karena pemanfaatan air bawah tanah dianggap sebagai salah satu penyebab penurunan permukaan tanah yang selanjutnya dipungut oleh pemerintah kota/kabupaten.

Secara keseluruhan, hasil perhitungan efektivitas masing-masing pajak daerah tergolong sangat efektif yang menunjukkan bahwa tujuan anggaran yang telah ditetapkan dalam bentuk target pajak daerah telah tercapai, bahkan melebihi target pada setiap sektor. Hal ini dikarenakan potensi daerah provinsi Jawa Tengah sangat mendukung dan berarti pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah telah melakukan perhitungan yang cukup teliti dalam menggali potensi pajak daerahnya.

Efisiensi Pajak Daerah

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*. Untuk mengukur tingkat efisiensi penerimaan masing-masing jenis pajak daerah dengan membandingkan antara biaya pemungutan pajak daerah yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Semakin kecil tingkat efisien berarti semakin baik kinerjanya.

Yang dimaksud *output* yaitu biaya yang dikeluarkan dalam upaya pemungutan pajak daerah. Dalam hal ini yang termasuk dalam biaya yaitu belanja langsung bagian urusan pajak yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Tabel 7
Efisiensi Pajak Daerah (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Efisiensi	Keterangan
2008	3,068,130,112,015	2,520,040,000	0.082	Sangat Efisien
2009	3,236,779,048,381	2,094,430,000	0.065	Sangat Efisien
2010	3,893,699,996,503	3,375,393,000	0.087	Sangat Efisien
2011	4,599,046,986,897	3,750,000,000	0.082	Sangat Efisien
2012	5,590,597,156,499	3,560,170,000	0.064	Sangat Efisien
Rata-rata			0.076	

Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah

Dalam Tabel 7 terlihat bahwa selama kurun waktu 5 tahun, tingkat efisiensi rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar 0,076. Berdasarkan kriteria efisiensi yang digunakan, menunjukkan bahwa DPPAD provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan sangat efisien, berarti manfaat yang didapatkan lebih besar daripada jumlah biaya yang dikeluarkan. Walaupun setiap tahunnya tergolong sangat efisien, tetapi tingkat efisiensi pajak daerah masih mengalami naik turun. Hal ini dipengaruhi oleh belum stabilnya besar peningkatan realisasi dengan besarnya biaya yang dikeluarkan.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Pajak daerah mempunyai kontribusi terhadap PAD. Untuk mengetahui besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD yaitu dengan membandingkan realisasi pajak daerah dengan realisasi PAD.

Tabel 8
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	PAD	% Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
2008	3,068,130,112,015	4,057,776,195,979	75.61
2009	3,236,779,048,381	3,716,052,663,294	87.10
2010	3,893,699,996,503	4,417,869,229,526	88.14
2011	4,599,046,986,897	5,088,713,212,530	90.38
2012	5,590,597,156,499	6,044,043,900,457	92.50
Rata-rata			86.74

Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah diolah

Berdasarkan Tabel 8, rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama kurun waktu 5 tahun sebesar 86,74%. Besarnya kontribusi menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki peran besar dalam penerimaan PAD setiap tahunnya dibandingkan dengan sumber penerimaan PAD yang lain, sehingga perlu dikelola dengan baik guna menunjang PAD di provinsi Jawa Tengah. Naiknya kontribusi pajak daerah provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan terhadap PAD setiap tahunnya secara umum dipengaruhi oleh keleluasaan pemerintah daerah dalam menggali potensi masing-masing sektor untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Perkembangan penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah selama periode 2008-2012 mengalami kenaikan yaitu rata-rata 13,09% per tahun.
- 2) Penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah selama periode 2008-2012 pada masing-masing sektor secara keseluruhan tergolong sangat efektif. Jenis pajak daerah yang paling efektif berdasarkan hasil analisa adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 117,51% per tahun.
- 3) Penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah selama periode 2008-2012 tergolong sangat efisien yaitu dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 0,076% per tahun.
- 4) Penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah selama periode 2008-2012 mendominasi PAD, yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 86,74% per tahun.

Saran

Berdasarkan pada hasil analisa dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

- 1) Bagi pemerintah daerah
 - (1) Perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap PAD.
 - (2) Perlu aktif memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak daerah dan melakukan penyederhanaan prosedur pembayaran pajak daerah untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya perlu memperluas jangkauan penelitian dengan menambahkan variabel retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi. 2011. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Volume 13 Nomor 1.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Suporno. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mustafa, Bob dan Abdul Halim. 2008. *Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 7 Nomor 4.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Ulum, Ihyaul MD. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

www.dppad.jatengprov.go.id